



CALK

SEMESTER I

TA 2024

Stasiun PSDKP Pontianak

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec.
Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kubu Raya, 9 Juni 2024
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19830131 200604 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
JL Dr. Moh Hatta, Sui Rengas, Kec. Sui Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalbar
TELEPON (0561) 773321, FAXIMILE (0561) 773321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kubu Raya, 9 Juni 2024
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi
NIP 19830131 200604 1 002

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Pontianak Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.206.796.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp14.829.784.026 atau mencapai 35,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp41.948.470.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.158.979.166 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.235.391.965; Aset Tetap (neto) sebesar Rp38.923.587.201; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.122.239.157 dan Rp29.036.740.009.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp320, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.942.974.301 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp(16.942.973.981). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.318.876 dan sebesar (Rp16.933.655.105) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(16.933.655.105).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp41.153.798.446 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(16.933.655.105) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0, Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp0, Koreksi lain – lain Rp19.438 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.816.577.230 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp39.036.740.009.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	13,206,796	0.00	4,614,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	13,206,796	0.00	4,614,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12,062,553,000	6,501,983,301	53.90	4,818,092,389
Belanja Barang	B.4	27,370,086,000	7,998,763,525	29.22	12,662,304,799
Belanja Modal	B.5	2,515,831,000	329,037,200	13.08	89,628,000
JUMLAH BELANJA		41,948,470,000	14,829,784,026	35.35	17,570,025,188

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	615,746,824	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	760,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	3,887,600
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(19,438)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	618,885,141	790,800,317
Jumlah Aset Lancar		1,235,391,965	794,668,479
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11,836,746,000	11,836,746,000
Peralatan dan Mesin	C.15	66,016,476,092	67,758,612,092
Gedung dan Bangunan	C.16	12,472,114,103	12,472,114,103
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	22,153,264,709	22,153,264,709
Aset Tetap Lainnya	C.18	647,298,080	647,298,080
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	151,528,500	80,355,300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(74,353,840,283)	(72,532,616,530)
Jumlah Aset Tetap		38,923,587,201	42,415,773,754
ASET LAINNYA			
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.21	-	187,851,098
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	187,851,098
JUMLAH ASET		40,158,979,166	43,398,293,331
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	615,746,824	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	481,926,328	244,494,885
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	24,566,005	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,122,239,157	244,494,885
JUMLAH KEWAJIBAN		1,122,239,157	244,494,885
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	39,036,740,009	41,153,798,446
JUMLAH EKUITAS DANA		39,036,740,009	41,153,798,446
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40,158,979,166	41,398,293,331

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		320	-
JUMLAH PENDAPATAN		320	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,910,296,602	5,135,769,318
Beban Persediaan	D.3	90,786,022	197,764,846
Beban Barang dan Jasa	D.4	5,866,334,887	12,233,939,217
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	1,115,930,960	1,578,116,984
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,138,402,077	652,047,672
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,821,223,753	1,914,234,468
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		16,942,974,301	21,711,872,505
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,942,973,981)	(21,711,872,505)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	233,338
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9,318,828	4,614,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		48	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9,318,876	4,380,662
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16,933,655,105)	(21,707,491,843)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16,933,655,105)	(21,707,491,843)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	41,153,798,446	44,614,211,942
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16,933,655,105)	(21,707,491,843)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	19,438	105,600,396
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN	E.3.4	-	120,169,146
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	(14,568,750)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	19,438	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14,816,577,230	17,565,411,188
EKUITAS AKHIR	E.5	39,036,740,009	40,577,731,683

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di amanahkan adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Pontianak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”**

Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab

- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 salah satu yang diamanatkan adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Disamping itu, terdapat pula arahan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
2. Pembinaan (penataan) nelayan lokal

UPT Stasiun PSDKP Pontianak melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 2 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah 5 unit yaitu Napoleon 003, Napoleon 037, Napoleon 038, TB. 01, dan *Searider*. Pembelian BBM dengan menggunakan voucher dilakukan untuk Napoleon 037 dan *searider* yang diambil di SPBU yang berada di Pontianak dan Napoleon 038 yang dapat diambil di SPBU yang berada di Sambas.

Sampai dengan Semester I TA 2024 terdapat barang bukti berupa kapal ikan asing sebanyak 22 kapal yang terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak dengan rincian:

-

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- 3 kapal lelang yang masih belum di ambil oleh pemenang
- 1 kapal yang dihibahkan ke UNDIP
- 2 kapal yang dihibahkan ke BPRSDM
- 4 kapal yang dihibahkan ke KKP, dan
- 12 kapal yang dititipkan ke kejaksaan

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 81 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 orang, Golongan III sebanyak 57 orang, dan Golongan IV sebanyak 2 orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan untuk 81 pegawai dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	9	13	13	62
	KP. Hiu Macan 01	16	-	-	2	16
	KP. Hiu 11	10	-	-	1	10
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	2	2	-	-	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	1	2	-	-	3
4	Wilker PSDKP Entikong	1	2	1	-	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2	1	1	-	4
6	Satwas SDKP Sambas	5	1	2	1	8
7	Wilker PSDKP Singkawang	1	1	-	-	2
8	Wilker PSDKP Jagoibabang	1	2	-	-	3
9	Wilker PSDKP Selakau	1	-	-	1	1
10	Wilker PSDKP Sajingan	1	1	-	-	2
11	Satwas SDKP Kayong Utara	4	2	-	-	6
12	Wilker PSDKP Ketapang	4	-	-	-	4
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	3	1	-	-	4
14	Wilker PSDKP Seruyan	2	-	-	-	2
Total		81	24	17	18	135

Pada anggaran tahun 2024 terdapat kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional yaitu;

- Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan (2350) dengan RO:
 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP,
 - Operasi Kapal Pengawas,

- Operasi Speedboat Pengawas,
 - Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, dan
 - Armada Pengawasan SDKP yang dirawat.
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan (2352) dengan RO:
- Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (2353) dengan RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan

pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak memiliki nomor DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000. Selama Tahun Anggaran 2024, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 5 (lima) kali. Rincian anggaran belanja Stasiun PSDKP Pontianak 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	13,206,796
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	13,206,796
Belanja		
Belanja Pegawai	12,062,553,000	12,062,553,000
Belanja Barang	27,411,282,000	27,370,086,000
Belanja Modal	2,474,635,000	2,515,831,000
Jumlah Belanja	41,948,470,000	41,948,470,000

Pada awal tahun 2024 terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp119.840.000 yang terdiri dari anggaran melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000 (anggaran belanja barang) dan anggaran yang belum dilengkapi Evaluasi Anggaran (Clearance) sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp100.000.000 (anggaran belanja modal).

Rincian Revisi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2024 dengan *digital stamp* DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

mempertimbangkan kondisi *geopolitik* global melalui *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000. Anggaran yang diblokir merupakan anggaran belanja barang (52) sebesar Rp1.866.760.000 dan anggaran belanja modal (53) sebesar Rp145.000.000. Total nilai anggaran yang diblokir sebesar Rp2.011.760.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	1,878,297,000	-	1,878,297,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000	-	35,000,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-
2355	Dukungan Manajemen Internal	119,840,000	78,623,000	19,840,000	78,623,000
Total		119,840,000	1,991,920,000	19,840,000	1,991,920,000

- Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2024 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
- Revisi ke 3 tanggal 22 April 2024 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowerring Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.

- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000. Total blokir anggaran yang masih tersisa sebesar Rp1.991.920.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	1,878,297,000		1,878,297,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-		-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000		35,000,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-		-
2355	Dukungan Manajemen Internal	19,840,000	78,623,000	-	78,623,000
Total		19,840,000	1,991,920,000	-	1,991,920,000

- Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja				
Belanja Pegawai	12,062,553,000	12,062,553,000	6,501,983,301	53.90
Belanja Barang	27,411,282,000	27,370,086,000	7,998,763,525	29.22
Belanja Modal	2,474,635,000	2,515,831,000	329,037,200	13.08
Jumlah Belanja	41,948,470,000	41,948,470,000	14,829,784,026	35.35

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai Rp19.913.930.000 dan realisasi sebesar Rp5.819.185.036 dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QDD	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	400,000,000	292,717,719	73.18					
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	400,000,000	292,717,719	73.18	Kelompok Masyarakat	4	1	25.00	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	12,810,403,000	4,419,566,870	34.50					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	11,758,753,000	4,136,068,710	35.17	Operasi	40	16	40.00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	1,051,650,000	292,639,000	27.83	Operasi	30	16	53.33	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,443,927,000	724,551,163	13.31					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	5,443,927,000	724,551,163	13.31	Unit	7	1	14.29	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	603,000,000	152,249,131	25.25					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	450,000,000	140,249,988	31.17	Lembaga	7	2	28.57	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	153,000,000	11,999,143	7.84	Lembaga	40	20	50.00	
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	656,600,000	230,100,153	35.04					
2353.QIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	656,600,000	230,100,153	35.04	Lembaga	100	34	34.00	
TOTAL		19,913,930,000	5,819,185,036	29.22					

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.RBQ	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32					
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32	Unit	1 Unit	0	-	
TOTAL		1,638,200,000	54,356,700	3.32					

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp13.206.796

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp13.206.796. Dibandingkan dengan periode 30 Juni 2023 sebesar Rp4.614.000, nilai realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 186,23%.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Hal tersebut disebabkan terdapat nilai lelang dan pengembalian belanja pegawai tahun lalu lebih besar daripada tahun yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9,318,828	-	0.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	4,614,000	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,887,648	-	0.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	320	-	0.00
Pendapatan Anggaran Lain - lain	-	-	0.00
Jumlah	13,206,796	4,614,000	186.23

Realisasi pendapatan sebesar Rp13.206.796 dengan uraian:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp9.318.828 dengan rincian:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768 tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.
 - Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp320 yang dibayarkan melalui NTPN F48BD55DF96LUUO6 dan NTB 000000296875 tanggal 29 Maret 2024 pada Kapal Pengawas Hiu 11 yang disebabkan adanya munculnya bunga bank pada

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atau rekening giro dan pengajuan tanpa jasa giro pada rekening giro tersebut oleh bendahara sedang dalam proses pengajuan.

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) sebesar Rp3.887.648 yang terdiri dari:
 - Melalui SP2D 3308055DF9BQ836I tanggal 22 Januari 2024 dan SPM 00022T/440847/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp18.
 - Melalui SP2D 240421305000662 tanggal 20 Maret 2024 dan SPM 00168T/440847/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp30.
 - Melalui NTPN 5227A48VVEPDR0BQ dan NTB 000000098753 tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp2.037.600.
 - Melalui NTPN 3308055DF9BQ836I dan NTB 000000095085 Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp1.850.000.

Sampai dengan bulan Juni TA 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan pemrosesan sanksi administratif, yang disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Sekretariat Jenderal PSDKP. Penetapan denda administratif tersebut dilakukan terhadap:

- KM. Herry melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dan mendaratkan ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan dengan jumlah denda administratif sebesar Rp32.175.000
- KM. Bejo Satrio I melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp133.747.200

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- KM. Buana Mulya melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha, yaitu telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan tidak mengaktifkan transmitter VMS selama beroperasi di laut dengan jumlah denda administratif sebesar Rp112.497.760.
- KM. Tirta Mangkurat Jaya melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha, yaitu telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan tidak mengaktifkan transmitter VMS selama beroperasi di laut dengan denda administratif sebesar Rp108.784.000.

Realisasi

Belanja Negara

Rp14.829.784.026

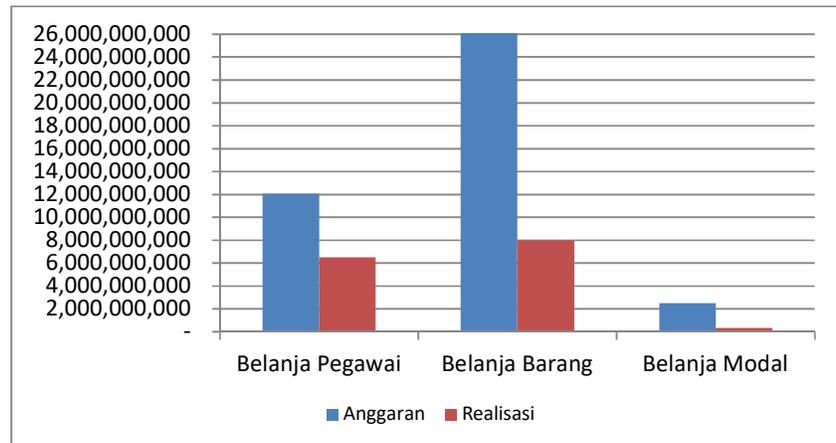
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp14.829.784.026 atau 35,35% dari anggaran belanja sebesar Rp41.948.470.000. Sedangkan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp17.570.025.188. Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni 2024 dan 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 15,60% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 30 Juni 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 2023

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,501,983,301	4,818,092,389	34.95
Belanja Barang	7,998,763,525	12,662,304,799	(36.83)
Belanja Modal	329,037,200	89,628,000	267.11
Total Belanja (Netto)	14,829,784,026	17,570,025,188	(15.60)



*Belanja
Pegawai
Rp6.501.983.301*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.501.983.301 dan Rp4.818.092.389. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 34,95% dari 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dan kenaikan grade tunjangan kinerja beberapa pegawai Stasiun PSDKP Pontianak serta adanya penambahan pegawai PPPK pada Semester II Tahun 2023

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

sebanyak 16 orang, dan penambahan pegawai PPPK pada bulan April sebanyak 2 org.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,215,487,700	1,996,267,120	10.98
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,040	34,391	4.79
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	188,533,890	171,457,896	9.96
Belanja Tunj. Anak PNS	61,307,828	53,885,627	13.77
Belanja Tunj. Struktural PNS	7,200,000	7,200,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	49,120,000	49,120,000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	19,459,554	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	148,967,940	149,040,360	(0.05)
Belanja Uang Makan PNS	154,443,000	166,139,000	(7.04)
Belanja Uang Tunj. Umum	86,620,000	88,695,000	(2.34)
Belanja Gaji Pokok PPPK	396,644,000	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,285	-	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,301,840	-	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,134,488	-	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	34,980,000	-	
Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	21,653,580		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,621,000	-	
Belanja Uang Makan PPPK	31,512,000	-	
Belanja Uang Lembur	148,231,000	115,640,000	28.18
Belanja Uang Lembur PPPK	34,025,000	-	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2,420,682,412	2,020,612,995	19.80
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	448,012,744	-	
Jumlah Belanja Netto (LRA)	6,501,983,301	4,818,092,389	34.95
Pengembalian Belanja Pegawai	926,482	483	-
Jumlah Belanja Bruto (Neraca)	6,502,909,783	4,818,092,872	34.97

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp926.482 berupa:

- Pengembalian pembulatan gaji PNS sebesar Rp1.482 yang terdiri dari:
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00121T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

SP2D nomor 240421305000531 tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp928.

- Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00122T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001680 tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp482.
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00143T/440847/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001928 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp72.
- Pengembalian belanja tunjangan umum sebesar Rp925.000 yang terdiri dari:
- Pengembalian belanja melalui billing dengan NTPN 9BE495229QIJCD7A dan NTB 000000092085 tanggal 8 Mei 2024 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Umum PNS Bulan Januari - April Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najooan, A.Md sebesar Rp740.000.
 - Pengembalian belanja melalui billing dengan NTPN 476D11GCAGAQVRP5 dan NTB 496815959821 tanggal 14 Mei 2024 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Umum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najooan, A.Md Rp.185.000

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp7.998.763.525

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.998.763.525 dan Rp12.662.304.799. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 36,83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal tersebut dikarenakan kerusakan mesin yang dialami oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga kapal tidak dapat beroperasi dan belanja operasional kapal belum dapat terealisasi. Sebagian

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

besar belanja barang berasal dari belanja barang non operasional yaitu belanja bahan berupa bahan bakar minyak untuk KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 711.

Selain itu terdapat belanja barang untuk operasional perkantoran antara lain berupa pembayaran langganan daya dan jasa, honor pegawai kontrak, konsumsi rapat, atk dan komputer supplies, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	728,454,898	1,267,660,543	(42.54)
Belanja Barang Persediaan (5218)	68,818,572	56,235,000	22.38
Belanja Barang Non Operasional (5219)	4,519,517,263	8,990,255,558	(49.73)
Belanja Pemeliharaan (5231)	962,572,234	1,264,704,700	(23.89)
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	1,138,402,077	614,175,994	85.35
Belanja Jasa (5221)	580,998,481	469,273,004	23.81
Jumlah Belanja Netto (LRA)	7,998,763,525	12,662,304,799	(36.83)
Pengembalian Belanja	-	348,800	-
Total Belanja Bruto (NERACA)	7,998,763,525	12,662,653,599	(36.83)

Belanja Modal
Rp329.037.200

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp329.037.200 dan Rp89.628.000.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 267,11%.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257,864,000	89,628,000	187.70
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	71,173,200	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	0	0.00
Belanja Modal Irigasi	0	0	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja	329,037,200	89,628,000	267.11
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	329,037,200	89,628,000	267.11

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp257.864.000 dan Rp89.628.000 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30 Juni 2024 dan 2023*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Lemari Besi/Metal	5,100,000		
Filling kabinet besi	4,700,000		
Kursi Besi/Metal		3,450,000	-100.00
Papan Pengumuman	14,300,000		
Kursi Fiber Glass/Plastik	1,600,000		
AC Split	24,914,000		
Sound System	21,400,000		
Digital LED Running Text	5,500,000		
Kamera Digital	29,999,999		
Kamera Konferensi	19,800,000		
Laptop	70,300,000	35,720,000	96.81
Tablet PC	40,200,001	12,598,000	
Printer	20,050,000	8,295,000	141.71
Televisi		2,289,000	-100.00
Filling Cabinet Besi		4,430,000	
Mesin Absensi		13,948,000	
Scanner		8,898,000	
Jumlah Belanja Kotor	257,864,000	89,628,000	187.70
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	257,864,000	89,628,000	187.70
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	257,864,000	89,628,000	187.70

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp71.137.200 dan Rp0. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- Perencanaan Garasi Satwas SDKP Kayong Utara sebesar Rp16.816.500 dan,
- Reviu Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp54.356.700.

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5.1. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi belanja modal penambahan nilai jaringan pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja tersebut merupakan belanja pembelian penambahan jaringan listrik dermaga Stasiun PSDKP Pontianak.

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2024 dan 2023.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada 30 Juni 2024 dan 2023 tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp615.746.824

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp615.746.824 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai di Brankas	125,100	-
Uang di Rekening Bank	378,337,418	-
Uang Muka (Voucher)	167,421,785	-
Saldo BPP	46,056,504	-
Kwitansi UP yang belum di SPM-kan	24,566,005	-
Sub Total I	616,506,812	-
Saldo Lainnya	760,000	-
Sub Total II	760,000	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	615,746,824	-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	(12)	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp760.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp760.000 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan SP2D perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS Bendahara dan sudah masuk ke dalam rekening bendahara yang berasal dari kelebihan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

pembayaran LS perjalanan dinas yang belum disetorkan sebagai pengembalian belanja.

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp3.887.600.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan (Rp19.438).

*Beban Dibayar
di Muka Rp0*

C.9 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Pendapatan **C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

yang Masih Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Rp 0

Persediaan **C.11 Persediaan**

Rp618.885.141

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp618.885.141 dan Rp790.800.317.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	41,262,750	62,157,200
Suku Cadang	577,622,391	728,643,117
Jumlah	618,885,141	790,800,317

Rincian mutasi transaksi persediaan pada modul pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2024 (Saldo Awal 2024)	790,800,317
Realisasi Belanja 521811 30 Juni 2023	69,891,572
Realisasi Belanja 523123 30 Juni 2023	58,071,500
Total Realisasi 30 Juni 2024	127,963,072
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan	0
Total	0
Saldo Awal + Total Realisasi + Total	918,763,389
Beban Persediaan Konsumsi	90,786,022
Beban Persediaan Suku Cadang	209,092,226
Total Beban	299,878,248
Selisih	618,885,141
Neraca 30 Juni 2024	618,885,141
Selisih	0

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2024	790,800,317
MUTASI TAMBAH	
TOTAL PEMBELIAN (pada SAKTI modul PERSEDIAAN)	127,963,072
TOTAL MUTASI TAMBAH	127,963,072
MUTASI KURANG	
BEBAN PERSEDIAAN (pada LO)	299,878,248
TOTAL MUTASI KURANG	299,878,248
SALDO AKHIR PADA 30 JUNI 2024	618,885,141

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2024	790,800,317
MUTASI TAMBAH	
M02 Pembelian	127,963,072
TOTAL MUTASI TAMBAH	127,963,072
MUTASI KURANG	
K01 Habis Pakai	-299,878,248
TOTAL MUTASI KURANG	-299,878,248
SALDO AKHIR PADA 30 JUNI 2024	618,885,141

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp127.963.072 merupakan transaksi pembelian dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp69.891.572
- Suku cadang sebesar Rp58.071.500

Mutasi kurang persediaan sebesar Rp299.878.248 berupa transaksi habis pakai dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp90.786.022
- Suku Cadang sebesar Rp209.092.226

Rincian persediaan periode 30 Juni 2024 adalah:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Kode	Uraian	Nilai
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	54,000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	35,000
1.01.03.01.005	Buku Tulis	86,250
1.01.03.01.007	Penggaris	30,000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	32,000
1.01.03.01.012	Staples	41,000
1.01.03.01.014	Barang Cetak	13,830,500
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	736,000
1.01.03.02.001	Kertas HVS	2,764,000
1.01.03.02.004	Amplop	28,700
1.01.03.03.999	Bahan Cetak Lainnya	23,481,000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	144,300
JUMLAH BARANG KONSUMSI		41,262,750
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	577,622,391
JUMLAH SUKU CADANG		577,622,391
TOTAL		618,885,141

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor SO/619/STA.4/PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp41.262.750 terdiri dari alat tulis, tinta tulis, penjepit kertas, ordner dan map, cutter, alat perekat, alat tulis kantor lainnya, kertas HVS, berbagai kertas, amplop, kertas dan cover lainnya, bahan cetak lainnya, tinta/toner printer, dan bahan komputer lainnya, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Pada bahan cetak lainnya merupakan bahan cetak form pengawasan, HPK, dan SLO baik yang sudah terdistribusi maupun yang belum terdistribusi di seluruh Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Persediaan suku cadang sebesar Rp577.622.391. Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu Macan 01, Hiu 11, Speedboat Pengawas, dan Rigid Inflatable Boat yang masih ada tahun 2024 dan 2023.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Tagihan TP/TGR Rp0 **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0 **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0 **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Tanah Rp11.836.746.000 **C.15 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.836.746.000 dan Rp11.836.746.000 dengan mutasi sebesar Rp 0. Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Per Tanggal 30 Juni 2024

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	44.908	Jl. Dr. M. Hatta, Kubu Raya, Kalimantan Barat	10.543.141.000
2	552	Jl. Malindo, Entikong, Kalimantan Barat	412.867.000
3	934	Jl. Hayam Wuruk, Ketapang, Kalimantan Barat	475.509.000
4	3.431	Jl. Swadaya, Waringin Barat, Kalimantan Tengah	405.229.000
Jumlah			11.836.746.000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

C.16 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp66.016.476.092 dan Rp66.016.476.092 Rp65.758.612.092. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp257.864.000. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	65,758,612,092
Mutasi tambah:	
Pembelian	257,864,000
Perolehan lainnya	12,100,000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(12,100,000)
Saldo per 30 Juni 2024	66,016,476,092
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(61,833,769,884)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	4,182,706,208

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp269.964.000 diperoleh dari:

- Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp257.864.000, sedangkan pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000) dan tidak tercatat di dalam neraca sebesar Rp13.868.100.

No	Uraian	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Lemari Besi/Metal	1	5,100,000		
2	Filling Cabinet Besi	1	4,700,000		
3	Papan Pengumuman	2	14,300,000		
4	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	1,600,000		
5	AC Split	6	24,914,000		
6	Sound system	1	21,400,000		
7	Digital LED Running Text	1	5,500,000		
8	Kamera Digital	1	29,999,999		
9	Kamera Konferensi	1	19,800,000		
10	Laptop	5	70,300,000		
11	Tablet PC	2	40,200,001		
12	Printer	2	20,050,000		
13	Alat Ukur Sigmat			5	4,750,000
14	Kursi Besi/Metal			1	952,800
15	Kompor Gas			2	1,230,000
16	Tangga Aluminium			1	997,500
17	Dispenser			5	3,048,000
18	Tempat Sampah			4	2,889,800
	TOTAL	24	257,864,000	18	13,868,100

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- Pembelian Kamera Sony sebanyak 1 unit sebesar Rp29.999.999 dan 2 unit Tablet PC IPAD Air sebesar Rp16.000.001 melalui SPM 000132T/440847/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001796 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp46.000.000.
- Pembelian 2 unit Tablet PC Samsung sebesar Rp12.100.000 melalui SPM 00133T/440847/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001797 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp24.200.000.
- Pembelian sebesar Rp49.414.000 melalui SPM 00219T/440847/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan SP2D Nomor 240421302002576 tanggal 1 April 2024 yang terdiri dari:
 - 2 Unit Lemari Arsip sebesar Rp9.800.000.
 - 4 Unit AC sebesar Rp16.614.000.
 - 1 Unit Kursi Direktur sebesar Rp1.600.000
 - 1 Unit Sound System sebesar Rp21.400.000
- Pembelian AC sebanyak 2 unit sebesar Rp8.300.000 dan 1 Unit Laptop sebesar Rp12.500.000 melalui SPM nomor 00385T/440847/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421302004387 tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp20.800.000.
- Pembelian melalui SPM nomor 00391T/440847/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan nomor SP2D 240421302004475 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp97.650.000 dengan rincian:
 - 1 unit Video Conference sebesar Rp19.800.000
 - 2 unit printer sebesar Rp20.050.000
 - 4 unit laptop sebesar Rp57.800.000
- Pembelian 1 unit running teks sebesar Rp5.500.000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

melalui SPM nomor 00472T/440847/2024 tanggal 9 Juni 2024 dan nomor SP2D 240421303002073 tanggal 10 Juni 2024.

- Pembelian 1 unit papan visual sebesar Rp14.300.000 melalui SPM 00559T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002344 tanggal 27 Juni 2024.

Selain pembelian peralatan dan mesin tersebut di atas terdapat pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp13.868.000 yang dibeli melalui:

- SPM nomor 00323T/440847/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421303001361 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp1.349.800 berupa kotak sampah sebanyak 2 unit.
- SPM nomor 00327T/440847/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421303001364 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp1.830.000 berupa kompor gas sebanyak 2 unit sebesar Rp1.230.000 dan 1 unit dispenser sebesar Rp600.000.
- SPM nomor 00554T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002332 tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp5.938.300 berupa:
 - Dispenser sebanyak 4 unit sebesar Rp2.448.000
 - Tempat sampah sebanyak 1 unit sebesar Rp1.540.000, dan
 - Tangga Alumunium sebanyak 1 unit sebesar Rp997.500.
 - Kursi roda sebanyak 1 unit sebesar Rp952.800.
- SPM nomor 00557T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002342 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp4.750.000 berupa Jangka

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Sorong (Digital Caliper) sebanyak 5 unit.

- Perolehan lainnya sebesar Rp12.100.000 berupa koreksi pencatatan nilai berkurang Tablet PC semula tercatat 1 unit sebesar Rp24.200.000 menjadi 2 unit sebesar Rp12.100.000 melalui surat keterangan koreksi pencatatan nomor 564/PSDKPSta.4/PL.110/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Mutasi kurang sebesar Rp12.100.000 yang terdiri dari:

- Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp12.100.000 pada Tablet PC melalui surat keterangan koreksi pencatatan nomor 564/PSDKPSta.4/PL.110/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024. Koreksi tersebut dilakukan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan kuantitas BMN pada aplikasi SAKTI modul komitmen yang semula 1 unit senilai Rp24.200.000 menjadi 2 unit dengan masing – masing bernilai Rp12.000.000.

Gedung dan

Bangunan

Rp12.472.114.103

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp12.472.114.103 dan Rp12.472.114.103. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 30 Juni 2024.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	12,472,114,103
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	-
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Transaksi normalisasi BMN	-
Saldo per 30 Juni 2024	12,472,114,103
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(2,102,752,282)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	10,369,361,821

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Jalan, Jaringan dan Irigasi **C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Rp22.153.264.709 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.153.264.709 dan Rp22.153.264.709. Mutasi saldo jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	22,153,264,709
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 Juni 2024	22,153,264,709
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(10,417,318,117)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	11,735,946,592

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp647.298.080

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp647.298.080 dan Rp647.298.080. Nilai tersebut diperoleh dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berupa Peta Digital sebanyak 2 buah melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA.09861/PSDKP.I/PL.430/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp151.528.500

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp151.528.500 dan Rp80.355.300. Rincian KDP yang diperoleh pada tahun anggaran 2024 terbagi menjadi dua yaitu KDP tahun yang lalu disebabkan pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan kembali pekerjaan fisiknya oleh karena adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga pekerjaan perencanaan dibayarkan 80% dan sisanya sebanyak 20%

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

akan dibayarkan kembali ketika pekerjaan fisik dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. KDP tersebut adalah:

- Perencanaan pembangunan Gudang Satwas Kotawaringin Barat sebesar Rp10.625.600.
- Perencanaan Rehab Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara sebesar Rp14.740.000.
- Perencanaan Rehab Mess Operator, dan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp37.821.600.

Dari transaksi tersebut KDP yang dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2024 adalah Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak dan Rehab garasi speedboat Satwas Kayong Utara. Untuk rehab mess operator Stasiun PSDKP Pontianak dan Pembangunan Gudang Satwas Kotawaringin Barat akan dilanjutkan di tahun selanjutnya.

Rincian mutasi KDP per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	80,355,300
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai KDP	71,173,200
Mutasi kurang:	-
Penghapusan KDP	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	151,528,500

Mutasi tambah KDP sebesar Rp71.173.200 dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara melalui SPM 00230T/440847/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan SP2D Nomor 240421304001162 tanggal 2 April 2024 sebesar Rp16.816.500.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- Perencanaan Reviu Gudang Stasiun PSDKP Pontianak melalui SPM 00304T/440847/2024 tanggal 18 April 2024 dan SP2D nomor 240421304001531 tanggal 22 April 2024 sebesar Rp54.356.700.

Rincian KDP sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis KDP	Volume	Lokasi	Kontraktor	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai KDP
1	Konsultan Perencanaan Pembagunan Gudang Satwas Kotawaringin Barat	1 Paket	Kotawaringin Barat	CV. CIPTA SARANA PRATAMA	123/Sta.4/PL.42 1/II/2020	31/01/2020	13,282,000	10,625,600
	Administrasi Proyek							9,213,100
2	Konsultan Perencanaan Rehab Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara	1 Paket	Kayong Utara	CV. SARANA KARYA SEJAHTERA	134/Sta.4/PL.42 1/II/2020	3/02/2020	18,425,000	14,740,000
	Administrasi Proyek							7,955,000
3	Perencanaan Rehab Mes Operator, dan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak	1 Paket	Pontianak	CV. CIPTA SARANA PRATAMA	121/Sta.4/PL.42 1/II/2020	31/01/2020	66,027,000	37,821,600
5	Perencanaan Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara	1 Paket	Pontianak	CV. CIPTA SARANA PRATAMA	SPK.129/PPK.Sta.4/III/2024	4/04/2024	16,816,500	16,816,500
6	Perencanaan Reviu Gudang Stasiun PSDKP Pontianak	1 Paket	Pontianak	CV. CIPTA SARANA PRATAMA	SPK.129/PPK.Sta.4/III/2024	3/03/2024	54,356,700	54,356,700
Jumlah								151,528,500

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp74.353.840.283*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni dan 31 Desember 2023 adalah masing – masing Rp74.353.840.283 dan Rp72.532.616.530. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	66,016,476,092	61,833,769,884	4,182,706,208
2	Gedung dan Bangunan	12,472,114,103	2,102,752,282	10,369,361,821
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,153,264,709	10,417,318,117	11,735,946,592
4	Aset Tetap Lainnya	647,298,080	0	647,298,080
Akumulasi Penyusutan		101,289,152,984	74,353,840,283	26,935,312,701

Aset Tak Berwujud Rp0

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp.187.851.098.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.24 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi tersebut berasal dari akumulasi aset tak berwujud dan aset lain – lain.

Uang Muka dari KPPN Rp615.746.824

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp615.746.824 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Persediaan yang diajukan ke KPPN sebesar Rp300.000.000 dan TUP sebesar Rp315.746.824.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Utang kepada Pihak Ketiga **C.26 Utang kepada Pihak Ketiga**

Rp481.926.328

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp481.926.328 dan Rp244.494.885. Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp408.313.301 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 47 Pegawai pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp210.192.014 dengan nomor SPM 00482T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 34 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp134.698.387 dengan SPM nomor 00483T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 8 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp29.999.663 melalui SPM nomor 00492T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 10 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp33.423.237 dengan SPM nomor 00493T/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024
- Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp72.853.027 yang merupakan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 24 Pegawai Nomor SK: 16/PSDKPSta.4/KP.120/I/2024 Tanggal 02-01-2024 Pada Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 dengan nomor SPM 00546T/440847/2024 tanggal 24 Juni 2024.

*Utang yang
belum Diterima
Tagihannya
Rp24.566.005*

C.27 Utang yang belum diterima tagihannya

Tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.566.005 dan Rp0. Rincian utang yang belum diterima tagihannya berupa kwitansi yang belum dibuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) adalah sebagai berikut:

- 01017/PB/440847/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp750.000
- 01018/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp1.500.000
- 01019/PB/440847/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp11.400.000
- 01020/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp4.900.009
- 01021/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp70.000
- 01022/PB/440847/2024 tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp598.000
- 01023/PB/440847/2024 tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp100.000
- 01024/PB/440847/2024 tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp720.000
- 01025/PB/440847/2024 tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp200.000
- 01026/PB/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp401.096
- 01027/PB/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp513.100
- 01028/PB/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp590.800

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- 01029/PB/440847/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp1.350.000
- 01030/PB/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp300.000
- 01031/PB/440847/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp353.000
- 01032/PB/440847/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp720.000
- 00371/PB/440847/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp100.000

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp481.166.328

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp481.166.328 dan Rp0. Beban tersebut merupakan SPM yang sudah diajukan pembayarannya ke KPPN namun belum terbit SP2Dnya, berupa:

- Beban pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp408.313.301 yang terdiri dari:
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 47 Pegawai pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp210.192.014 dengan nomor SPM 00482T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 34 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp134.698.387 dengan SPM nomor 00483T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 8 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp29.999.663 melalui SPM nomor 00492T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 10 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp33.423.237 dengan SPM nomor 00493T/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024.
- Beban barang yang masih harus dibayar sebesar Rp72.853.027 yang merupakan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 24 Pegawai Nomor SK: 16/PSDKPSta.4/KP.120/I/2024 Tanggal 02-01-2024 Pada Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 dengan nomor SPM 00546T/440847/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Ekuitas

Rp39.036.740.009

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.036.740.009 dan Rp41.153.798.446. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp320 dan Rp0. Nilai tersebut diperoleh dari setoran jasa giro Rekening Penampung Lainnya (RPL) milik Kapal Pengawas Hiu 11 yang dibayarkan melalui NTPN F48BD55DF96LUUO6 dan NTB 000000296875 tanggal 29 Maret 2024.

*Beban Pegawai
Rp6.910.296.603*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.910.296.603 dan Rp5.135.769.318. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	2,940,135,800	2,243,873,320	31.03
Beban Pembulatan Gaji	50,204	38,326	30.99
Beban Tunjangan-Tunjangan	3,601,899,598	2,610,078,672	38.00
Beban Uang Makan	185,955,000	166,139,000	11.93
Beban Lembur	182,256,000	115,640,000	57.61
Jumlah Beban Pegawai (LO)	6,910,296,602	5,135,769,318	34.55
Belanja Pegawai Tahun yang Lalu		-	#DIV/0
Pengembalian Belanja Pegawai	926,482	483	#####
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(408,313,301)	(317,676,929)	-
Jumlah Beban Pegawai (Neraca)	6,502,909,783	4,818,092,872	34.97

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Terdapat selisih antara beban pegawai di neraca dengan beban pegawai di LO sebesar (Rp407.386.819) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp1.482 dengan rincian:
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp928 melalui SPM nomor 00121T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421305000531 tanggal 8 Maret 2024.
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp482 melalui SPM nomor 00122T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001680 tanggal 8 Maret 2024.
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp72 melalui SPM nomor 00143T/440847/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001928 tanggal 15 Maret 2024.
- Pengembalian tunjangan umum sebesar Rp925.000 dengan rincian:
 - Pengembalian Belanja Kelebihan Bayar Tunjangan Umum PNS Bulan Januari - April Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoan, A.Md sebesar Rp740.000 melalui NTPN 9BE495229QIJCD7A dan NTB 000000092085 tanggal 8 Mei 2024.
 - Pengembalian Kelebihan Belanja Tunjangan Umum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoan, A.Md sebesar Rp185.000 melalui NTPN 476D11GCAGAQVRP5 dan NTB 496815959821 tanggal 14 Mei 2024.
- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar (Rp408.313.301) dengan rincian:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 47 Pegawai pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp210.192.014 dengan nomor SPM 00482T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
- Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2024 untuk 34 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp134.698.387 dengan SPM nomor 00483T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
- Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 8 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp29.999.663 melalui SPM nomor 00492T/440847/2024 tanggal 10 Juni 2024.
- Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2024 untuk 10 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp33.423.237 dengan SPM nomor 00493T/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Beban

Persediaan

Rp90.786.022

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.786.022 dan Rp197.764.846. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	90,786,022	197,764,846	(54.09)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	90,786,022	197,764,846	(54.09)

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Beban Barang dan Jasa
Rp5.866.334.887

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.866.334.887 dan Rp12.233.939.217. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	653,077,705	1,261,896,033	-48.25
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	108,885,020	103,153,510	5.56
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,623,200	2,965,000	89.65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36,972,000	62,300,000	-40.65
Beban Barang Operasional Lainnya	3,847,561,908	0	#DIV/0!
Beban Bahan	6,500,000	9,793,658,458	-99.93
Beban Honor Output Kegiatan	667,987,264	1,300,000	51,283.64
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,868,100	490,364,100	-97.17
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	233,166,311	0	
Beban Langganan Daya dan Jasa	74,149,179	316,938,116	-76.60
Beban Jasa Konsultan	6,184,200	110,000,000	
Beban Sewa	110,000,000	13,900,000	691.37
Beban Jasa Profesi	20,700,000	77,464,000	
Beban Jasa Lainnya	81,660,000	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	5,866,334,887	12,233,939,217	-52.05
Pembayaran Beban Tahun Lalu	56,643,787	28,969,552	95.53
Ralat SPM		-	
Utang	(94,008,032)	(35,847,138)	
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	5,828,970,642	12,227,061,631	-52.33

Terdapat selisih antara beban di LO dengan di Neraca sebesar (Rp37.364.245) yang merupakan:

- Tagihan daya dan jasa bulan Desember 2023 yang dibayarkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp56.643.787 yang terdiri dari:
 - Belanja langganan listrik sebesar Rp34.902.405 yang dibayarkan melalui SPM 00014T/440847/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp27.666.452 nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

SP2D 240421304000057 tanggal 17 Januari 2024 dan SPM 00071T/440847/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan SP2D nomor 240421303000286 sebesar Rp7.235.953, serta

- Belanja langganan telepon Rp21.741.382 yang dibayarkan melalui SPM 00007T/440847/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan SP2D nomor 240421302000078 sebesar Rp16.796.090 dan SPM 00071T/440847/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan SP2D nomor 240421303000286 sebesar Rp4.945.292.
- Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp94.008.032 berupa:
 - Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp74.353.027 berupa pembayaran Belanja Barang Berupa:
 - Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 24 Pegawai Nomor SK: 16/PSDKPSta.4/KP.120/I/2024 Tanggal 02-01-2024 Pada Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 sebesar Rp72.853.027 yang telah diajukan pembayarannya ke KPPN melalui SPM nomor 00546T/440847/2024 tanggal 24 Juni 2024,
 - Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp1.900.000 yang telah dibuat perintah bayar dengan nomor:
 - ✓ 01030/PB/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp300.000
 - ✓ 01018/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp1.500.000
 - ✓ 01023/PB/440847/2024 tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp100.000
 - Pembayaran penambah daya tahan tubuh sebesar Rp1.350.000 yang telah dibuat perintah bayar dengan nomor 01029/PB/440847/2024 tanggal 24 Juni 2024.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

- Pembayaran belanja bahan sebesar Rp16.400.009 yang telah dibuat perintah bayar dengan nomor:
 - 01020/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp4.900.009, dan
 - 01019/PB/440847/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp11.400.000, dan
 - 00371/PB/440847/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp100.000
- Pembayaran langganan listrik sebesar Rp401.096 yang telah dibuat perintah bayar nomor 01026/PB/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024.
- Pembayaran langganan telepon sebesar Rp1.103.900 yang telah dibuat perintah bayar nomor 01026/PB/440847/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Beban

Pemeliharaan

Rp1.115.930.960

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp1.115.930.960 dan Rp1.578.116.984. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,001,500	62,891,293	(132.92)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	863,585,634	1,305,623,013	(51.19)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13,371,600	3,099,600	76.82
Beban Pemeliharaan Jaringan	2,880,000	16,088,000	(458.61)
Beban Persediaan Suku Cadang	209,092,226	190,415,078	8.93
Jumlah	1,115,930,960	1,578,116,984	-29.29

Beban Perjalanan

Dinas

Rp1.138.402.077

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.138.402.077 dan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Rp652.047.672. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	872,026,092	515,845,988	40.85
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	73,090,000	45,450,000	37.82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60,000,000	39,998,000	33.34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133,285,985	50,753,684	61.92
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	1,138,402,077	652,047,672	42.72
Pengembalian belanja	0	348,800	#DIV/0!
Utang yang belum ditagihkan	0	(37,871,678)	#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (NERACA)	1,138,402,077	652,047,672	42.72

Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas di LO dan Neraca.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.821.223.753*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.821.223.753 dan Rp1.914.234.468. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2024 dan 2023

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,397,564,283	1,371,648,430	1.85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141,245,821	141,245,821	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	282,413,649	401,293,550	- 42.09
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	46,667	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,821,223,753	1,914,234,468	- 5.11

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp9.318.876*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Nilai kegiatan non operasional sebesar Rp9.318.876 diperoleh dari:

- a. Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp9.318.828 yang diperoleh dari Pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya melalui:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768 tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.
 - Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.

b. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp48 yang diperoleh dari:

- Pembulatan gaji sebesar Rp30 melalui SPM nomor 00168T/440847/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421305000662 tanggal 20 Maret 2024.
- Pembulatan gaji sebesar Rp18 melalui SPM nomor 00022T/440847/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan SP2D nomor 240421302000187 tanggal 22 Januari 2024.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9,318,828	4,614,000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	233,338	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	9,318,828	4,380,662	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	48	0	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu		0	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	48	0	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	0	#DIV/0!
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9,318,876	4,380,662	112.73

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan
Rp0 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp41.153.798.446

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.153.798.446 dan Rp44.614.211.942.

Defisit LO

(Rp15.933.655.105)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp15.933.655.105) dan (Rp21.707.491.843). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 30 Juni 2024 dan 2023.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Barang yang dilakukan reklasifikasi semula berupa aset tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan inventarisasi

dapat disimpulkan bahwa BMN tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai aset tetap sebab tergolong barang habis pakai yang telah digunakan sejak BMN tersebut diperoleh, dengan nilai perolehan <Rp1.000.000. Koreksi reklasifikasi periode 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp120.169.146.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas asset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan asset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp14.568.750. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp19.438*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp19.438 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Nilai tersebut merupakan pajak 0,5% dari nilai tunjangan yang belum dibayarkan. Nilai piutang tidak tertagih sebesar Rp10.188 yang diperoleh dari piutang tunjangan kinerja tahun 2023

yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp2.037.600 dan piutang tak tertagih sebesar Rp9.250 yang diperoleh dari piutang tunjangan umum tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp1.850.000.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp14.816.577.230

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.816.577.230 dan Rp17.565.411.188. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(13,206,796)
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,829,784,026
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	14,816,577,230

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024 dan 2023, DDEL sebesar (Rp13.206.796) dan (Rp4.614.000), sedangkan DKEL sebesar Rp14.829.784.026 dan Rp17.570.025.188.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

masuk/transfer keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp39.036.740.009

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.036.740.009 dan Rp40.577.731.683.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 30 Juni 2024 pada Stasiun PSDKP Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.1/Sta.4/KU.611/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu:
 - PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
 - PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Amil Maulana sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

KEP.2/PSDKPSta.4/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

2. Pelaksanaan revisi sampai dengan 30 Juni sebanyak 5 (lima) kali dengan *digital stamp* DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000 yaitu:
 - Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2024 dengan digital stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global melalui automatic adjustment (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000.
 - Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2024 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
 - Revisi ke 3 tanggal 22 April 2024 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowering Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.

- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000.
 - Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
3. Terdapat saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024. SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2023 dengan nomor SPM 00825T/440847/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan SP2D nomor 230420301000253 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp187.851.098 yang merupakan belanja pemeliharaan jalan lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak yang telah selesai pekerjaannya tanggal 27 Desember 2023 melalui BAST nomor BAST.351/PPK.Sta.4/XII/2023 yang pembayarannya dilaksanakan di tahun anggaran 2024 melalui SPM nomor 00005T/440847/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan SP2D nomor 249991305000007 tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp187.851.098.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

4. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 01 nomor 108/Sta.4-HMC.01/PW.430/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 sisa Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 4.600 liter, dan BA nomor 112/Sta.4-HMC.01/PW.430/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 sisa minyak pelumas M/E, A/E, Gearbox sebanyak 517 liter, dan minyak pelumas hidrolis sebanyak 72 liter. Sedangkan berdasarkan berita acara sisa BBM Kapal Pengawas Hiu 11 nomor 500/Sta.4-HIU11/PW.431/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 4.900 liter. Pagu anggaran BBM Kapal Pengawas sebesar Rp9.229.028.000 yang kemudian di addendum menjadi Rp7.967.768.000 dengan nilai realisasi BBM sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp3.690.659.000 sebanyak 162 KL, dengan rincian BBM Hiu Macan 01 sebesar Rp1.647.745.000 dengan BBM sebanyak 73 KL dan BBM Hiu 11 sebesar Rp2.042.914.000 dengan BBM sebanyak 89 KL.

Nama Kapal	Bulan	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 11	Januari	10,170	-	2,940	7,230
	Februari	7,230	5,000	2,980	9,250
	Maret	9,250	14,000	22,470	780
	April	780	22,000	13,850	8,930
	Mei	8,930	31,000	34,310	5,620
	Juni	5,620	5,000	5,720	4,900
KP. Hiu Macan 01	Januari	28,440	25,000	38,340	15,100
	Februari	15,100	-	4,100	11,000
	Maret	11,000	20,000	20,000	11,000
	April	11,000	28,000	12,500	26,500
	Mei	26,500	-	11,000	15,500
	Juni	15,500	-	10,900	4,600

Berdasarkan BA nomor 502/Sta.4-HIU11/PW.431/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 terdapat

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

sisanya minyak pelumas M/E dan A/E sebanyak 90 liter, minyak pelumas gear box sebanyak 0 liter, dan minyak pelumas oli hidrolik sebanyak 25 liter.

5. Sampai dengan Semester I 2024 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp9.318.828 dengan rincian:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768 tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.
 - Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.
6. Terdapat temuan BPK yang telah dibayarkan pada Semester I 2024 berupa pembayaran tunjangan umum dan tunjangan kinerja kepada pegawai tugas belajar atas nama Lucky Michael Najooan yang dilaksanakan tanggal 21 September 2022 sd 20 September 2024 dengan nomor SK 20/KEPMEN/KP.532/III/2023, dimana seharusnya dilakukan penghentian pembayaran tunjangan umum terhitung mulai bulan ketujuh yaitu April 2023 sesuai dengan tertera dalam SK tersebut. Sedangkan untuk tunjangan kinerja yang dibayarkan pada kelas jabatan 8 yang seharusnya dibayarkan pada kelas jabatan 7 sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembalian belanja pegawai tersebut

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

akan dilakukan pada tahun 2024, dengan rician pengembalian sebagai berikut:

- a. Pengembalian Tunjangan Umum sebesar Rp1.850.000 dari bulan April sampai dengan Desember 2023 serta Tunjangan Umum Hari Raya Tahun 2023 yang dibayarkan melalui NTPN 3307055DF9BQ836I dan NTB 000000095085 tanggal 8 Mei 2024
 - b. Pengembalian Tunjangan Kinerja sebesar Rp2.037.600 dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan melalui NTPN 5227A48VVEPDR0BQ dan NTB 000000098753 tanggal 8 Mei 2024.
7. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung IMB tersebut telah berubah menjadi SLF (Surat Laik Fungsi) yaitu seluruh bangunan yang berada di Pontianak dan Wilker PSDKP Ketapang. Untuk SLF Kantor Wilker PSDKP Ketapang sampai dengan pelaporan telah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ketapang dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan SLF. Sedangkan untuk Kantor Pontianak batas tanah secara digital dari BPN tidak sesuai eksistingnya yang terbit di dalam sertifikat tanah Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, sehingga permasalahan tersebut sedang diajukan oleh Biro Hukum KKP ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
8. Sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI lingkup Ditjen PSDKP Nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2024

1092/PSDKP.1/TU.210/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, yakni terkait temuan BPK RI atas LK KKP periode TA 2010 – 2021 yakni BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPB terkait supaya menginput bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, pada Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 65 NUP senilai Rp56.647.948.442 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 64 NUP senilai Rp56.587.948.422 sehingga sampai dengan tanggal pelaporan masih tersisa sebanyak 1 NUP senilai Rp60.000.000 berupa speedboat/motor tempel yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 yang masih belum ditindak lanjuti. Hal tersebut disebabkan motor tempel tersebut merupakan bagian dari sekoci yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah dari mesin tempel tersebut.

9. Sampai dengan 30 Juni 2024 terdapat bank garansi yang masih berlaku dengan nomor 001/BG-KKR/P/2024 tanggal 10 Juni 2024 berupa Jaminan Pelaksanaan CV Lestari pada pekerjaan Pembangunan Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara sebesar Rp16.779.000.
10. Aset yang telah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebagai berikut:

Uraian Aset	Total Aset	Nilai Aset Yang Sudah ada SK PSP	Aset yang sedang dalam Proses PSP	Aset Tetap yang belum di PSP
Tanah	11,836,746,000	11,836,746,000		0
Gedung dan Bangunan	12,472,114,103	12,472,114,103		0
Peralatan dan Mesin	66,106,244,192	65,834,512,092	0	271,732,100
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,153,264,709	22,153,264,709	0	0

11. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat LHIP Itjen yang masih ada yang belum dapat ditindaklanjuti dengan LHP Nomor 4379/ITJ.0/HP.310/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang hasil pemantauan perencanaan pembangunan konstruksi di Stasiun PSDKP Pontianak, yaitu:

- Merubah judul kegiatan pekerjaan rehab garasi speedboat menjadi pekerjaan pembangunan garasi speedboat. Judul tersebut baru dapat dilaksanakan pada saat kontrak fisik dilanjutkan kembali.
- Menetapkan tim teknis sesuai PPK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi. Hal tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh karena pembangunan konstruksi ditiadakan pada TA 2020 dan belum dilanjutkan kembali pada TA 2021, maka pembentukan tim teknis ditangguhkan hingga anggaran pelaksanaan konstruksi tersebut ada.